

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.

Email: arsa@ijrs.or.id



Profil Singkat

Arsa Ilmi Budiarti merupakan lulusan program sarjana Sosiologi, Universitas Indonesia. Arsa pernah menjabat sebagai Manajer Pengelolaan Pengetahuan di IJRS. Arsa juga aktif sebagai peneliti senior dan kerap menjadi Program Manager (PM) di berbagai kerja-kerja IJRS. Salah satu yang terbaru adalah keterlibatannya sebagai PM pada program “Kajian Portal *Online* Penyedia Informasi Bantuan Hukum di Indonesia bersama PBHI dan Yayasan TIFA” di tahun 2023.

Beberapa program lainnya yang pernah ia jalankan antara lain, *Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan di Indonesia tahun 2022 bersama Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Pemantauan dan Evaluasi Perilaku Hakim dalam Penanganan Perempuan dan Anak di Pengadilan sesuai Perma 3/2017 dan Perma 5/2019 bersama AIPJ2, Mahkamah Agung RI, dan Kelompok Masyarakat Sipil, serta Pelatihan Perempuan dan Anak: E-Learning Perma 3/2017 dan Perma 5/2019 bagi Hakim di Mahkamah Agung RI bersama AIPJ2.*

Arsa memiliki ketertarikan di isu Kelompok Rentan, Akses terhadap Keadilan, dan *Open Government* Selama berkarya di IJRS, ia telah menghasilkan belasan buku bersama peneliti lainnya, tulisan di media hingga artikel jurnal.

Jabatan Saat Ini

Direktur Eksekutif

Pendidikan

S1 Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (lulus 2015)

Pengalaman Kerja

1. Anggota Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI (2023 - sekarang)
2. Anggota Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Kejaksaan RI (2023 - sekarang)
3. Konsultan untuk Indeks Pembangunan Hukum di Bappenas RI (2023 - sekarang)

4. Anggota Tim Peneliti untuk Kajian Anggaran Bantuan Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (2023 - sekarang)
5. Anggota Tim Koalisi untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia di Sektor Akses Keadilan (2022 - sekarang)

Program IJRS yang Pernah Dijalankan

1. Project Manager dan Peneliti untuk Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan di Indonesia tahun 2022 bersama Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) (2022-2023)
2. Project Manager dan Peneliti untuk Pemantauan dan Evaluasi Perilaku Hakim dalam Penanganan Perempuan dan Anak di Pengadilan sesuai Perma 3/2017 dan Perma 5/2019 bersama AIPJ2, Mahkamah Agung RI, dan Kelompok Masyarakat Sipil (2021 - sekarang)
3. Program Officer untuk Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia tahun 2021 (2022-2023)
4. Program Officer dan Peneliti untuk Penyusunan Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2021 (2022-2023)
5. Peneliti untuk Review Implementasi Pelaksanaan Perma 3/2017 terhadap Perilaku Hakim dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di wilayah Jakarta dan Kepulauan Riau bersama Komnas Perempuan (2021-2022)
6. Program Officer untuk Pelatihan kepada Hakim terkait Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak bersama Ecpat Indonesia (2021)
7. Peneliti untuk Kompendium Pendampingan ODHA Berhadapan dengan Hukum bersama The Asia Foundation (2021)
8. Program Officer untuk Panduan Pemantauan Perma 3/2017 terkait Perilaku Hakim dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
9. Program Manager untuk Pelatihan Perempuan dan Anak: E-Learning Perma 3/2017 dan Perma 5/2019 bagi Hakim di Mahkamah Agung RI bersama AIPJ2 (2021)
10. Peneliti untuk Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender: UU TPKS dan Perkawinan Anak bersama INFID (2020 - 2021)
11. Peneliti untuk Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan tahun 2019 bersama Yayasan TIFA (2019 - 2020)
12. Peneliti untuk Penyusunan Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019 bersama IDLO dan Bappenas RI (2019 - 2020)

Program IJRS yang Sedang Dijalankan

1. Program Manager dan Peneliti untuk Kajian Portal *Online* Penyedia Informasi Bantuan Hukum di Indonesia bersama PBHI dan Yayasan TIFA (2023)
2. Program Manager untuk Penguatan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan di Indonesia bersama BPHN dan The Asia Foundation (2023)
3. Program Manager untuk Penguatan Keterbukaan Pemerintah Indonesia bersama Bappenas RI dan Ford Foundation (2023)
4. Program Officer untuk Pelatihan Pendampingan Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan bersama PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, YLBHI dan NCHR (2023)

5. Program Officer untuk Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia tahun 2022 (2023)

Hasil Publikasi

Buku

1. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (2023)
2. Laporan Penelitian Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022 (2023)
3. Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 – 2020) (2022)
4. Laporan Penelitian Kualitatif Hasil Kajian Atas Penerapan PERMA 3/2017 di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP: Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku (2022)
5. Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia 2021 (2022)
6. Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2021 (2022)
7. Kompendium Pendamping ODHA Berhadapan dengan Hukum (2021)
8. Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019 (2020)
9. Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 di Lampung dan Sulawesi Selatan (2020)
10. Buku Saku Hakim Perma 5/2019: Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2020)
11. Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) untuk Mahkamah Agung RI .Penelitian Kualitatif: Kondisi Akses Terhadap Keadilan Untuk Perempuan Dan Perempuan Dari Kelompok Rentan Lain Pada Masa Covid-19 di Indonesia
12. Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (2020)
13. Catatan Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (2020)
14. Membangun Kapasitas Hakim dalam Mengadili TPESA (2020)

Artikel Jurnal

1. The Role of Technology in the COVID-19 Pandemic Era: A lesson learned from Indonesia in Increasing Access to Legal Aid, 2023. DOI: <https://doi.org/10.19184/csi.v3i1.27710>
2. Pengaruh Interaksi Dalam Peer Group Terhadap Perilaku Cyberbullying Siswa, 2016, DOI: <https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23522>

Opini / Tulisan di Media

1. Opini media, The Conversation tentang “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk prioritas DPR, tapi masyarakat masih memiliki pemahaman berbeda-beda” (<https://theconversation.com/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-masuk-prioritas-dpr-tapi-masyarakat-masih-memiliki-pemahaman-berbeda-beda-158303>), 2021
2. Opini media, The Conversation tentang “Siapkah Polisi menjadi garda terdepan mekanisme pelaporan kekerasan seksual?” (<https://theconversation.com/siapkah-polisi-menjadi-garda-terdepan-mekanisme-pelaporan-kekerasan-seksual-169726>), 2021
3. Opini media, Pakar Menjawab: kenapa banyak korban kekerasan seksual malah minta maaf atau menarik laporannya? (<https://theconversation.com/pakar-menjawab-kenapa-banyak-korban-kekerasan-seksual-malah-minta-maaf-atau-menarik-laporannya-177460>), 2022
4. Opini media, Pakar Menjawab: UU TPKS sudah sah! Apa yang patut dirayakan dan apa yang kurang? (<https://theconversation.com/pakar-menjawab-uu-tpks-sudah-sah-apa-yang-patut-dirayakan-dan-apa-yang-kurang-181330>), 2022